



**REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM RANGKA
PENATAAN SDM UPT BADAN POM
DAN
PROGRESS KONDISI ASET TANAH BADAN POM**

**Kepala Biro Umum dan SDM
Jakarta, 29 Juni 2018**

OUTLINE

1

PENDAHULUAN

2

TAHAPAN REDISTRIBUSI PEGAWAI

3

RENCANA INSENTIF BAGI PEGAWAI LOKA POM

4

**DAMPAK SOTK UPT BARU TERHADAP
PENGELOLAAN SDM UPT**

5

KONDISI ASET TANAH BADAN POM

6

PENUTUP

5

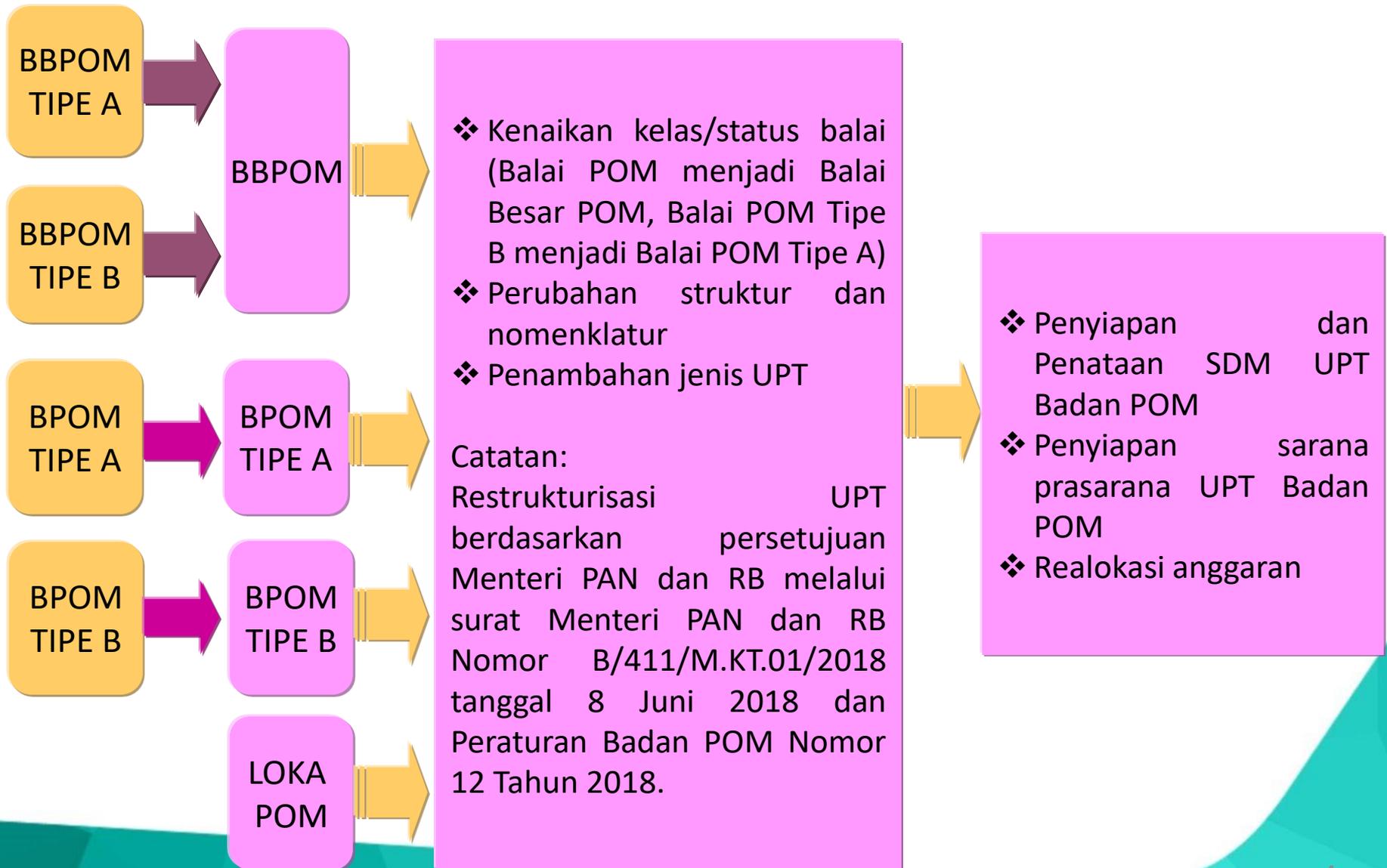




PENDAHULUAN



Restrukturisasi UPT BPOM



FORMASI JABATAN STRUKTURAL UPT

SEMULA

JENIS	Σ UPT	ES. II/ UPT	ES. III/ UPT	ES. IV/ UPT	Σ FORMASI JABATAN
BBPOM TIPE A	12	1	5	5	132
BBPOM TIPE B	7	1	4	7	84
BPOM TIPE A	7		1	6	49
BPOM TIPE B	7		1	4	35
TOTAL	33	19	102	179	300

MENJADI

JENIS	Σ UPT	ES. II/ UPT	ES. III/ UPT	ES. IV/ UPT	Σ FORMASI JABATAN
BBPOM	21	1	5	6	252
BPOM TIPE A	7		1	6	49
BPOM TIPE B	5		1	4	25
LOKA POM	40			40	40
TOTAL	73	21	117	228	366

Tambahan 66 formasi jabatan struktural

Tingkat Pemenuhan Pegawai UPT SOTK Lama (April 2018)

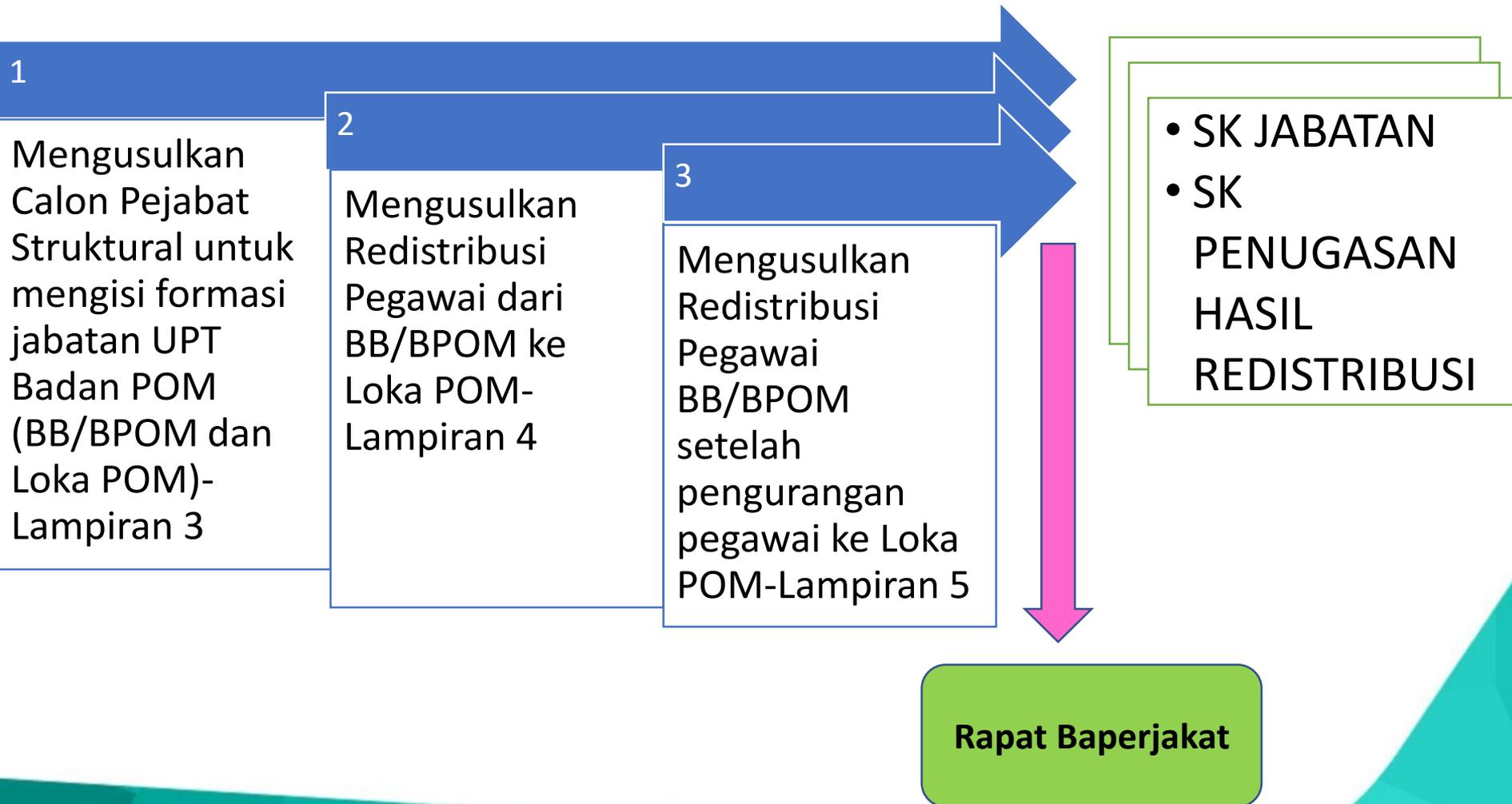
NO	UNIT KERJA	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	JUMLAH PEGAWAI EKSISTING	% PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI
1	BBPOM Yogyakarta	115	112	97.39%
2	BBPOM Samarinda	99	79	79.80%
3	BBPOM Aceh	99	77	77.78%
4	BPOM Bengkulu	93	72	77.42%
5	BPOM Batam	68	52	76.47%
6	BBPOM Pontianak	110	84	76.36%
7	BPOM Palu	80	61	76.25%
8	BPOM Gorontalo	58	43	74.14%
9	BPOM Kendari	95	68	71.58%
10	BBPOM Padang	145	103	71.03%
11	BBPOM Pangkalpinang	64	45	70.31%
12	BBPOM Bandung	221	149	67.42%
13	BBPOM Lampung	157	97	61.78%
14	BBPOM Manado	109	66	60.55%
15	BBPOM Mataram	128	73	57.03%
16	BBPOM Denpasar	179	102	56.98%
17	BPOM Manokwari	76	43	56.58%
18	BBPOM Pekanbaru	161	90	55.90%
19	BPOM Sofifi	29	16	55.17%
20	BBPOM Makassar	225	119	52.89%
21	BPOM Jambi	133	68	51.13%
22	BBPOM Medan	229	117	51.09%
23	BPOM Ambon	106	54	50.94%
24	BBPOM Surabaya	287	146	50.87%
25	BPOM Kupang	134	67	50.00%
26	BBPOM Jayapura	158	72	45.57%
27	BBPOM Semarang	322	144	44.72%
28	BBPOM Palembang	174	77	44.25%
29	BBPOM Jakarta	263	103	39.16%
30	BBPOM Banjarmasin	209	74	35.41%
31	BPOM Serang	216	72	33.33%
32	BPOM Palangkaraya	187	62	33.16%
33	BPOM Mamuju	44	12	27.27%



TAHAPAN REDISTRIBUSI PEGAWAI



Tahapan Redistribusi Pegawai



Ketentuan Redistribusi Pegawai

- ❖ Usulan pengisian pegawai Loka POM berasal dari BB/BPOM setempat yang menjadi BB/BPOM Koordinator Loka POM tersebut kecuali BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta
 - a. BBPOM di Jakarta dapat mengusulkan redistribusi pegawai ke Loka POM di Bogor dan Tangerang
 - b. BBPOM di Yogyakarta dapat mengusulkan redistribusi pegawai ke Loka POM di Surakarta dan Banyumas
- ❖ Pengusulan Kandidat Kepala Loka POM harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan kompetensi dan kinerja yang ditetapkan.
- ❖ Pengusulan redistribusi pegawai telah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tupoksi BB/BPOM dan Loka POM.
- ❖ Pengusulan redistribusi pegawai ke Loka POM sejumlah maksimal 13 orang dengan komposisi pegawai:
 - a. Kepala Loka POM
 - b. PFM Bidang Pemdik, maksimal 8 orang (Minimal 1 orang PPNS)
 - c. PFM Bidang Serlik 2 orang
 - d. PFM Bidang Pengujian 1 orang
 - e. Staf Tata Usaha 1 orang

Fungsi Layanan Informasi Konsumen

- Kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan serta layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada kelompok masyarakat sebanyak 40 orang sebesar 1 jam/hari dengan dengan 6 jam efektif perhari

-1 (satu) tahun sebanyak 250 hari kerja/orang

- 1 Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melakukan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, KIE selama 1 (satu) tahun, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah penduduk yang mendapat layanan KIE} &= 40\text{Orang} \times 6 \text{ Jam/Hari} \times 1 \text{ Thn} \\
 &= 240\text{Orang/Hari} \times 250 \text{ Hari Kerja} \\
 &= \mathbf{60,000}\text{Orang}
 \end{aligned}$$

-Rasio kebutuhan 1 PFM : 60.000 penduduk

-Jumlah Penduduk Indonesia (tahun 2015) = 254,826,034

- Asumsi 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 (empat) jiwa sehingga pengawasan/KIE ditujukan kepada Kepala Keluarga/Ibu Rumah Tangga

$$= 254,826,034 \text{ dibagi } 4$$

$$= 63,706,509$$

$$= 63,706,509 \text{ dibagi } 60,000$$

$$= 1,062$$

Kebutuhan PFM

$$= 106$$

- Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum 10% untuk administrasi dari Jumlah PFM

Kebutuhan PFM untuk fungsi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, KIE

$$= \text{PFM ditambah Fungsional Umum}$$

$$= 1,062 \text{ ditambah } 106$$

$$= \mathbf{1,168} \text{ Orang}$$

Fungsi Pengawasan (termasuk pemdik, serlik, pengujian)

Pemeriksaan sarana - sertifikasi

1 (satu) tahun sebanyak 250 hari kerja

1 Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melakukan pengawasan, dengan perhitungan:

Jumlah sarana seluruh Kab/Kota (tidak termasuk IRTP) = 72953 Sarana

Lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah perencanaan pemeriksaan sarana, pemeriksaan sarana, penyusunan LHP, penyusunan rekomendasi, pembahasan CAPA, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, penjatuhan sanksi (jika diperlukan)

Pengawasan Dilakukan selama 2 hari untuk 1 Sarana, = 72953 dikali 2.0 hari = 145906 Sarana.hari dibagi 250 kerja/orang = 584 Sarana

Pengawasan dilakukan oleh 1 tim dan setiap tim 2 orang = 584 Sarana x 2 orang/sarana = **1167 Orang**

Penyidikan

1 (satu) tahun sebanyak 250 hari kerja

1 Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melakukan pengawasan, dengan perhitungan:

Jumlah kasus tahun 2015 = 1201 kasus
 Jumlah perkara = 277 projusticia 2015

Jumlah obat palsu (sesuai WHO), rata-rata global) **(catatan : Negara maju 10 % dan negara berkembang 10% - 30 % 25 - 30 %)**

Temuan obat palsu di Indonesia 1%
 Asumsi jumlah obat palsu di Indonesia 10%
 Asumsi jumlah perkara naik dengan naiknya obat palsu yang beredar

Potensi perkara yang diprojusticiakan = 10% dibagi 1% dikalikan 277 = **2,770 perkara**

Kinerja PPNS, asumsi menggunakan dasar kinerja tahun 2015 = 1.25 perkara/orang/thn = **2,220 orang**

Pengujian

Asumsi 1 (satu) tahun sebanyak 250 hari kerja

Asumsi 1 Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melakukan pengujian dengan perhitungan:

Jumlah sampel Kab/kota	=	500 sampel/Kab- Kota		
Jumlah sampel Kab/kota per tahun	=	517		
Jumlah Total sampel	=	500 dikali	517	Kab/kota
	=	258500 sampel/thn		
Asumsi 1 sampel diuji selama 1 hari (6 jam efektif)	=	258500 dibagi	250	hari kerja
	=	1034		orang

TOTAL JUMLAH SDM YANG DIBUTUHKAN PER TAHUN UNTUK SELURUH 517 KAB/KOTA UNTUK 4 FUNGSI

KIE	1,168	
Pem - Ser	1,167	
Penyidikan	2,220	
Pengujian	1,034	
TU/Administrasi	559	
Total	6,148	Orang

KEBUTUHAN SDM PER KAB/KOTA/TAHUN

6148	Orang	dibagi	517	Kab/Kota
12	Orang			

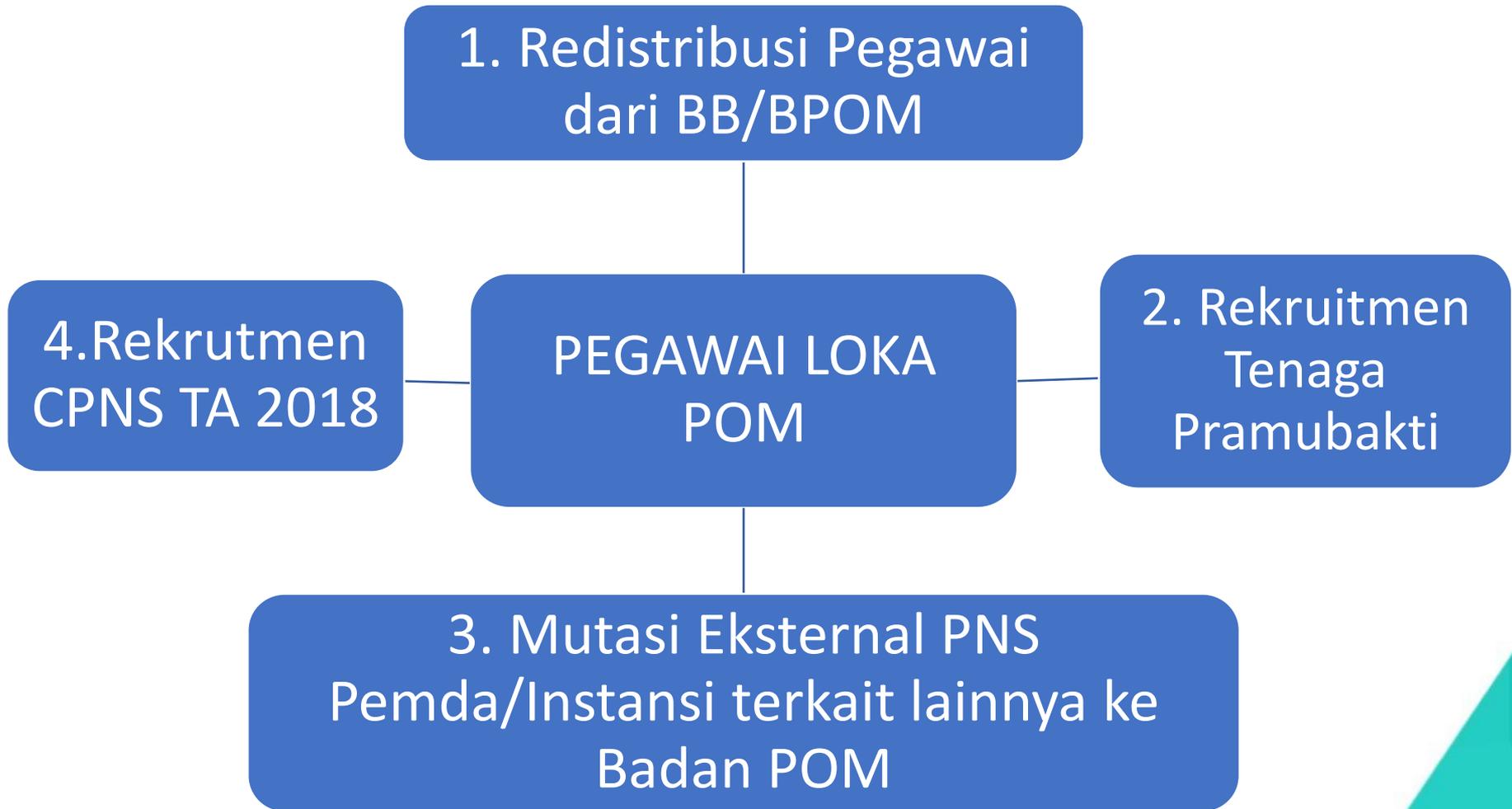
KRITERIA KEPALA LOKA POM

1. Usulan 3 (tiga) orang kandidat calon Kepala Loka (setingkat Eselon IV) yang memiliki kriteria kompetensi Kepala Loka POM sesuai dengan pangkat minimal III.b.
2. Memiliki Integritas yang tinggi (tidak memiliki catatan khusus dari Inspektorat).
3. Memiliki kompetensi dalam bidang pemeriksaan pengawasan dan atau pengujian (pernah menjabat sebagai struktural teknis dan atau fungsional yang terkait).
4. Pekerja keras dan pejuang tangguh (rekomendasi atasan).
5. Memiliki wawasan kebangsaan.
6. Diutamakan pegawai yang pernah mendapat penghargaan di bidangnya.

Catatan:

Tugas Kepala BB/BPOM adalah mengusulkan profil yang sudah memenuhi syarat sebagai Kepala Loka POM kepada Pimpinan di Pusat. Kepala BB/BPOM tidak dalam posisi menawarkan formasi jabatan tersebut kepada staf dimaksud karena pengisian formasi jabatan struktural adalah penugasan dan penolakan tugas akan ditindak sesuai dengan PP Disiplin PNS.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pegawai di Loka POM



Catatan: Sebelum SK Pindah/Mutasi Eksternal ditetapkan, BB/BPOM atau Loka POM diharapkan untuk meminta bantuan Pemda memperkerjakan sementara pegawai Pemda tsb.

Mekanisme Mutasi Eksternal ke Badan POM



Persyaratan Mutasi Eksternal ke Badan POM ⁽¹⁾

1. Telah berstatus PNS.
2. Memiliki kesesuaian pendidikan PNS pemohon dengan formasi yang dibutuhkan.
3. Telah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja instansi asal terkait permohonan pindah antar instansi.
4. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau masa pengabdian setelah selesai tugas belajar.
5. Tidak pernah/sedang dihukum disiplin tingkat sedang dan berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran peraturan disiplin yang diterbitkan oleh pejabat yang menangani kepegawaian dari instansi asal.
6. Tidak menuntut jabatan struktural dan fungsional.
7. Berbadan sehat jasmani dan rohani.
8. Bersedia ditempatkan dimana saja di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Persyaratan Mutasi Eksternal ke Badan POM (2)

- Balai Besar/Balai POM melakukan verifikasi sesuai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian formasi di Balai Besar/Balai POM dengan pendidikan PNS pemohon.
 - b. Jika pegawai memiliki pendidikan S2 atau lebih, harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang tertera pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar PNS di lingkungan BPOM.
 - c. PNS yang mengajukan pindah merupakan lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
 - d. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh BPOM. Dibuktikan dari hasil pemeriksaan lembaga psikologi dan wawancara oleh Tim di Balai Besar/Balai POM.
 - e. Berbadan sehat dibuktikan dengan hasil tes kesehatan dari RS Pemerintah.
 - f. PNS yang pindah memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan oleh hasil wawancara oleh Tim di Balai Besar/Balai POM.

Rekapitulasi Usulan Redistribusi Pegawai ke Loka POM (1)

NO	NAMA BB/BPOM	LOKA POM		JUMLAH YG AKAN DI REDISTIBUSI	UNIT KERJA ASAL				
		NO	NAMA		PENGUJIAN	PEMDIK	SERLIK	TU	Pos POM
1	BBPOM Aceh	1	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	7	1 PNS, 1 CPNS	3 PNS	1 HNR	1 HNR	
		2	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	7	1 CPNS, 1 HNR	3 PNS	1 PNS	1 PNS	
2	BBPOM Medan	3	Loka POM di Kota Tanjungbalai	7	3 PNS	2 PNS	1 PNS	1 PNS	
		4	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	6	1 CPNS Catt: Usulan An. Rosalina Manalu, SH status CDTN dan Ybs penddk non teknis, bukan staf pengujian	1 PNS, 1 CPNS	2 PNS	1 PNS	
3	BBPOM Padang	5	Loka POM di Kota Payakumbuh	8	1 PNS , 1 HNR	4 PNS	1 PNS	1 HNR	
		6	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	7	2 PNS	2 PNS	1	2	
4	BBPOM Pekanbaru	7	Loka POM di Kota Dumai	6	1 PNS	3 PNS	1 PNS	1 PNS	
		8	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir / Tembilahan	7	2 PNS	3 PNS	1 PNS	1 PNS	
5	BPOM Jambi	9	Loka POM di Kota Sungai Penuh	7	3 PNS	2 PNS	1 PNS	1 PNS	
6	BBPOM Palembang	10	Loka POM di Kota Lubuklinggau	6	1 PNS	3 PNS	1 PNS	1 PNS	
7	BPOM Bengkulu	11	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	8	4 PNS	1 PNS, 1 HNR	-	2 PNS	
8	BBPOM Bandar Lampung	12	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	7	1 PNS, 1 CPNS	3	-	2 PNS	
9	BPOM Pangkalpinang	13	Loka POM di Kabupaten Belitung	3	1 PNS	1 PNS		1 PNS	

Rekapitulasi Usulan Redistribusi Pegawai ke Loka POM (2)

NO	NAMA BB/BPOM	LOKA POM		JUMLAH YG AKAN DI REDISTIBUSI	UNIT KERJA ASAL				
		NO	NAMA		PENGUJIAN	PEMDIK	SERLIK	TU	Pos POM
10	BPOM Batam	14	Loka POM di Kota Tanjungpinang	7	2 PNS, 2 CPNS	3 PNS			
11	BBPOM Bandung	15	Loka POM di Kota Tasikmalaya	6	1 PNS	1 PNS		1 PNS, 3 HNR	
		16	Loka POM di Kabupaten Bogor	6	1 PNS	1 PNS		2 PNS, 2 HNR	
12	BBPOM Semarang	17	Loka POM di Kabupaten Banyumas	1 PNS + 5 PNS Non Semarang	-	1 PNS	-	-	
		18	Loka POM di Kota Surakarta	10	4 PNS	4 PNS	1 PNS	1 PNS	
13	BBPOM Surabaya	19	Loka POM di Kabupaten Kediri	4 + 3 PNS Non Surabaya	1 PNS	2 PNS	1 PNS		
		20	Loka POM di Kabupaten Jember	2 + 2 PNS Non Surabaya		1 PNS	1 PNS		
14	BBPOM Serang	21	Loka POM di Kabupaten Tangerang	7	2 PNS	4 PNS		1 PNS	
15	BBPOM Denpasar	22	Loka POM di Kabupaten Buleleng	7	1 PNS, 1 CPNS	3 PNS	1 PNS	1 PNS	
16	BBPOM Mataram	23	Loka POM di Kabupaten Bima	3	2 CPNS	1 PNS			
17	BPOM Kupang	24	Loka POM di Kabupaten Ende	3	1 CPNS			1 PNS	1 PNS
		25	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	3	1 PNS	2 PNS			
18	BBPOM Pontianak	26	Loka POM di Kabupaten Sanggau	7	1 PNS		1 HNR	1 PNS	4 PNS

Rekapitulasi Usulan Redistribusi Pegawai ke Loka POM (3)

NO	NAMA BB/BPOM	LOKA POM		JUMLAH YG AKAN DI REDISTRIBUSI	UNIT KERJA ASAL				
		NO	NAMA		PENGUJIAN	PEMDIK	SERLIK	TU	Pos POM
19	BBPOM Palangkaraya	27	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	4	2 PNS	2 PNS			
20	BBPOM Banjarmasin	28	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	2	2 PNS				
		29	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	2	1 PNS	1 PNS			
21	BBPOM Samarinda	30	Loka POM di Kota Balikpapan	4	4 PNS				
		31	Loka POM di Kota Tarakan	6 + 1 PNS non Samarinda	1 CPNS	1 CPNS	1 CPNS		3 PNS
22	BBPOM Manado	32	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	7	2 PNS	3 PNS		1 PNS, 1 HNR	
23	BPOM Palu	33	Loka POM di Kabupaten Banggai	4	3 PNS	1 PNS			
24	BBPOM Makassar	34	Loka POM di Kota Palopo	7	3 PNS, 2 HNR	1 PNS	1 PNS		
25	BPOM Kendari	35	Loka POM di Kota Baubau	2	1 PNS			1 PNS	
26	Ambon	36	Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	5	4 PNS, 1 CPNS				
27	BPOM Sofifi	37	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	2		1 PNS		1 HNR	
28	BPOM Manokwari	38	Loka POM di Kabupaten Sorong	5 + 1 CPNS Non Manokwari + 1 PNS Pemda	1 PNS	2 PNS		2 HNR	
29	BBPOM Jayapura	39	Loka POM di Kabupaten Merauke	4	1 PNS				1 PNS, 2 HNR
		40	Loka POM di Kabupaten Timika	2 + 2 HNR + 2 Pemda	1 CPNS		1 PNS		



RENCANA INSENTIF BAGI PEGAWAI LOKA POM



Rencana Insentif bagi Pegawai Loka POM

- ❑ KEPALA LOKA POM AKAN DIUSULKAN *JOB CLASS* (JC) 12
(SEPANJANG DISETUJUI OLEH KEMENPAN RB)
- ❑ ALOKASI ANGGARAN KHUSUS LOKA POM:
 - a. Anggaran Pengawasan OM
 - b. Anggaran Operasional Perkantoran (Honor Pramubakti, Jasa Keamanan, CS, LTGA, Layanan Internet, Belanja Sewa Kantor dan Kendaraan, Belanja Modal APD dll)

Catatan:

Untuk penggunaan belanja sewa perkantoran agar juga dialokasikan untuk **sewa rumah dinas Kepala Loka POM** dan ***mess* pegawai Loka POM**

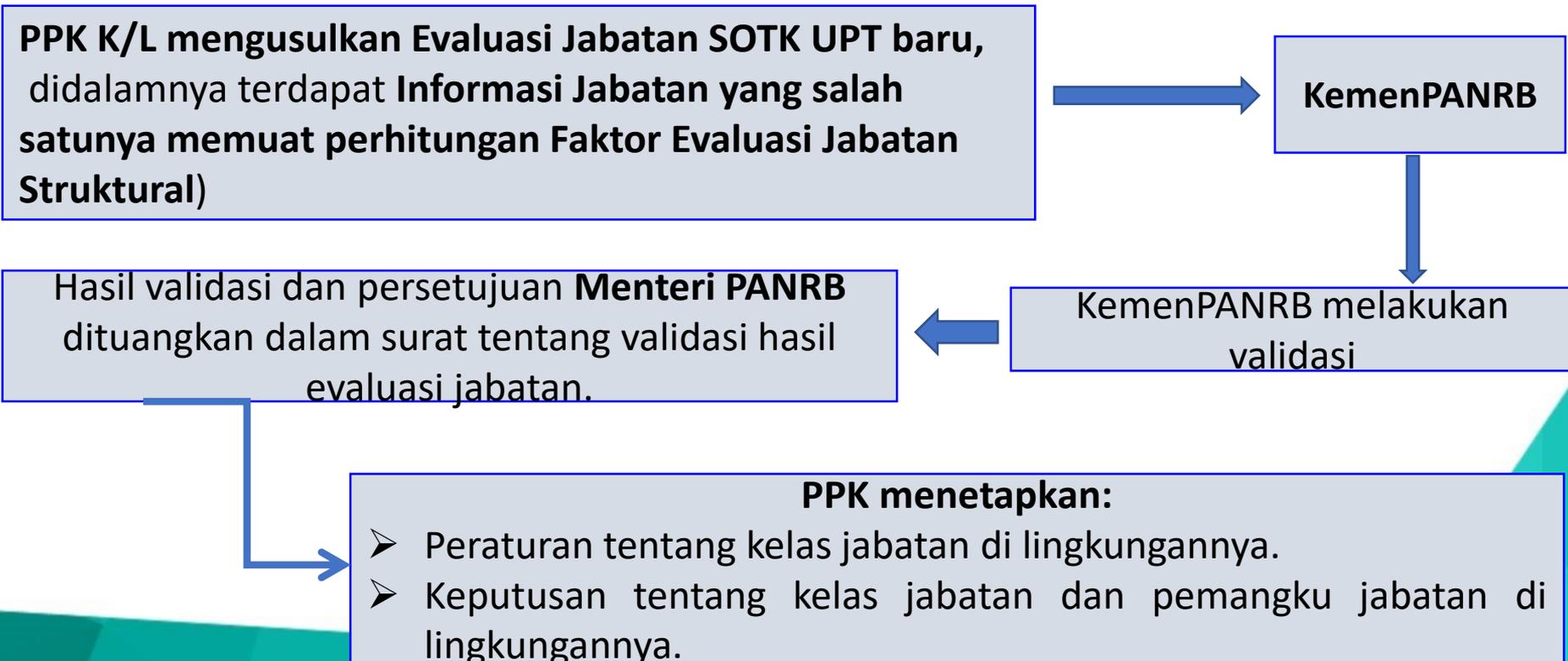


DAMPAK SOTK UPT BARU TERHADAP PENGELOLAAN SDM UPT



DAMPAK SOTK UPT BARU (1)

1. Tunjangan Kinerja Pejabat Struktural SOTK UPT Baru masih dibayarkan sesuai JC lama sampai adanya persetujuan hasil evaluasi dan validasi jabatan dari Kementerian PAN dan RB. Tahapan usulan *job class* SOTK UPT baru:



2. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural **Eselon III dan IV** SOTK Lama ke dalam Jabatan Fungsional PFM sebelum dilantik ke dalam Jabatan Struktural SOTK Baru

→ *Saat ini sedang dilakukan verifikasi portofolio. Apabila ada kekurangan berkas, akan segera dimintakan kekurangannya.*

3. Apabila terdapat pejabat struktural SOTK lama yang tidak dilantik kembali ke dalam jabatan struktural SOTK baru, maka:

a. Ybs diangkat sebagai Pelaksana (jabatan fungsional umum) jika tidak tersedia formasi jabatan PFM di UPT tersebut

b. Ybs diangkat sebagai PFM, dengan catatan:

- masih tersedia formasi PFM yang sesuai dengan pangkat/golongan ybs atau
- calon pejabat yang diusulkan sebagai pejabat struktural adalah PFM dengan jenjang jabatan yang setara dengan pangkat/golongan pejabat struktural yang akan difungsionalkan



KONDISI ASET TANAH BADAN POM



KONDISI ASET TANAH BPOM⁽¹⁾

- Sejumlah **24 BBPOM/BPOM** telah memperoleh tanah dengan status **sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pengawas Obat dan Makanan**
- Terdapat **6 BBPOM/BPOM** telah mendapatkan **hibah tanah** dan sedang dalam pengurusan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq BPOM, meliputi :

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽²⁾

No	Satker	Asal Hibah	LT/LB	Alamat	Keterangan
1	BBPOM LAMPUNG	Sertifikat Tanah Hak Pakai No.33/PH Tanggal 12 April 1984 dan Depkes RI dengan luas 17.060 m ² . Sertifikat Tanah ada di BBPOM Lampung, dalam proses pemecahan sertifikat karena satu kesatuan dengan Gudang Farmasi	?????????,551	Jl. Dr. Susilo No.102-105, Bandar Lampung	Kantor BBPOM
2	BBPOM PONTIANAK	Hibah tanah sesuai Keputusan Bupati Sambas Nomor 88/SETDA-PERLENGKAPAN/2015 dan BAST nomor 028/349.b/PC/2015	?????????,500	didaerah perbatasan Aruk	Pos POM Aruk
3	BBPOM PALEMBANG	Hibah dari Pemprov Sumatera Selatan sesuai BAST Hibah nomor 001/BA/BPKAD/2018 dan B-PR.07.06.1.24.01.18.0184 tentang BAST Hibah tanggal 11 Januari 2018	?????????,892	Jl. Pangeran Ratu, Kakabaring-Seberang Ulu, Palembang	Kantor BBPOM
4	BBPOM SAMARINDA	BAST Hibah Tanah nomor 028/2912/1537-VI/BPKAD	?????????,875	Jl. Letdjen. Soeprato No.3 Samarinda	Kantor BBPOM
5	BPOM GORONTALO	Telah dihibahkan sesuai SK Gubernur Gorontalo nomor 223/29/vii/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang hibah tanah Pemprov Gorontalo kepada BPOM. BAST Hibah nomor 633/HKM-ORG/BA/VII/2017 dan PR.04.01.101.07.17	?????????,878	Jl. Tengah Desa Toto Selatan. Kec. Kabila Kab Bone Balango	Kantor BPOM

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽³⁾

No	Satker	Asal Hibah	LT/LB	Alamat	Keterangan
6	BBPOM BANJARMASIN	SK Gubernur Kalsel nomor 188.44/0459/KUM/2015 tentang pemindahtanganan BMN. Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor KU.04.04.1.03.16.1535 Tgl 30 Maret 2016	10,000	Kecamatan cempaka, banjarbaru	Kantor BBPOM

- Terdapat **3 Satker** dengan status hibah berupa **pemecahan tanah dengan sertifikat induk masih berada pada Kementerian Kesehatan**, berdasarkan SK Alih Status Kemenkes Nomor: PL.03.02/III/2145/2011, meliputi :

No	Satker	LT/LB	Alamat	Keterangan
1	SEKRETARIAT UTAMA	31,520	Jalan Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat	Kantor BPOM
2	BBPOM SURABAYA	2,660	Karang Menjangan 22	Kantor BBPOM
3	BBPOM JAYAPURA	1,142	Jl. Diponegoro No. 63	Kantor BBPOM

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽⁴⁾

- Terdapat sejumlah aset tanah yang berstatus pinjam pakai, yaitu:
 - ✓ Baik tanah maupun rumah dinas pada BPOM di Jambi
 - ✓ BBPOM di Mataram mengelola aset tanah untuk kantor BBPOM dan Pos POM Bima. Tanah kantor BBPOM berstatus pinjam pakai, berdasar Surat Gubernur NTB nomor 030/252/BPKAD tanggal 16 Oktober 2017 perihal pemindahtanganan BMD Pemprov NTB, menyatakan bahwa untuk permohonan hibah tanah kantor tersebut akan disetujui dengan ketentuan BBPOM di Mataram menyediakan lahan pengganti.

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽⁵⁾

TANAH STATUS PINJAM PAKAI

- ✓ BPOM di Kupang mengelola aset tanah untuk Pos POM Atambua dan Pos POM Ende dan telah bersurat kepada bupati Atambua dan bupati Ende, tetapi belum ada tanggapan dari pemerintah daerah setempat.
- ✓ Tanah kantor BPOM Kendari berstatus pinjam pakai dan BPOM telah bersurat Nomor PR.02.03.105.10.16.1975 tanggal 17 Okt 2016 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Permohonan Hibah Tanah, tetapi belum ada balasan tertulis.
- ✓ BPOM di Sofifi mengelola aset tanah di Pos POM Ternate dengan dasar Surat dr Walikota Ternate nomor 593/40/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Bantuan Penyediaan lahan.

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽⁶⁾

TANAH STATUS PINJAM PAKAI

- ✓ BBPOM di Manado mengelola aset tanah Pos POM Sangihe, dan telah berkoordinasi dengan Bupati Sangihe. Dalam surat No. 440/02/1303 tanggal 18 Juli 2017, Bupati Sangihe merekomendasikan untuk meningkatkan status pos POM di Tahuna menjadi unit organisasi BBPOM di Manado.
- ✓ BPOM di Serang mengelola lahan untuk kantor dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah. Hasil koordinasi terakhir pada tahun 2016, Pemerintah Daerah sedang mendaftarkan sertifikat hak pakai tanah yang ditempati BPOM di Serang.

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽⁷⁾

- Terdapat sejumlah aset tanah yang terkendala, antara lain:
 - ✓ Tanah kantor BPOM 2 di Kelapa Dua Wetan (KDW), Jakarta Timur
 - ✓ Rumah Dinas pada BPOM di Ambon, proses pemecahan sertifikat tanah terhalang.
 - ✓ BBPOM di Jayapura mengelola aset tanah untuk Pos POM di Merauke yang berstatus pinjam pakai dan telah mengajukan permohonan hibah tanah, tetapi terkendala hak ulayat masyarakat adat yang belum selesai.

KONDISI ASET TANAH BPOM⁽⁸⁾

TANAH TERKENDALA

- ✓ BBPOM di Samarinda mengelola aset tanah untuk Pos POM Tarakan dan telah bersurat ke Walikota Tarakan untuk pengajuan pinjam pakai sekaligus hibah melalui surat Nomor B-HM.03.04,100,05.17.2901 tgl 29 Mei 2017. Hasil koordinasi Balai ybs dengan pemerintah daerah, tanah tersebut merupakan tanah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara, sehingga Pemerintah Daerah Tarakan belum dapat memproses pengajuan pinjam pakai maupun hibah.



PENUTUP



1. Dalam mengusulkan redistribusi pegawai, Kepala BB/BPOM wajib mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tupoksi BB/BPOM dan Loka POM.
2. Usulan redistribusi pegawai akan ditindaklanjuti melalui rapat baperjakat dengan output SK Jabatan Struktural dan SK Penugasan Redistribusi Pegawai.
3. Pengusulan pengisian pegawai UPT dari Pemda/instansi terkait lainnya, harus sesuai dengan Pedoman Pindah Pegawai.
4. Kepala BB/BPOM agar dapat mensosialisasikan dengan baik tahapan restrukturisasi dan redistribusi kepada seluruh pegawai BB/BPOM.
5. Diperlukan komitmen Kepala BB/BPOM sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk menyelesaikan masalah aset tanah.
6. Kepala BBPOM/BPOM agar berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah untuk tanah lokasi Loka

TERIMA KASIH



BADAN POM

Hidup Sehat Dengan
“**CekKLIK**”

- ☑ CEK KEMASAN
- ☑ CEK LABEL
- ☑ CEK IZIN EDAR
- ☑ CEK KEDALUARSA

 **1500533**
HALOBPOM

www.pom.go.id | Follow us  Bpom RI  @BPOM_RI  BPOM RI

PROGRESS MUTASI INTERNAL

No	Progress	Jumlah Usulan	Keterangan
1	Pegawai dapat disetujui pindah dengan menyesuaikan ketersediaan formasi jabatan di unit kerja tujuan dengan % pemenuhan kebutuhan pegawai < 60%	29 orang	Dapat diproses sepanjang semua persyaratan administratif telah dilengkapi oleh pegawai ybs.
2	Pegawai dapat disetujui pindah apabila tersedia formasi jabatan di unit kerja tujuan dengan % pemenuhan kebutuhan pegawai 60-80%	11 orang	
3	Usulan pindah pegawai tidak dapat diproses ke unit kerja tujuan dengan % pemenuhan kebutuhan pegawai > 80%	9 orang	
4	Pending untuk usulan pindah ke Loka POM	3 orang	
5	Menunggu arahan Pimpinan	1 orang	
Total		53 orang	

REKAPITULASI MUTASI PEGAWAI

I. REKAPITULASI PENGAJUAN MUTASI INTERNAL PERIODE 2014-JUNI 2018

NO	JENIS MUTASI INTERNAL	USULAN MASUK	VERIFIKASI BERKAS	SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN BERKAS	SURAT PENAWARAN KE UNIT KERJA TUJUAN	SK	SURAT PENOLAKAN	TOTAL	KETERANGAN
1	JABATAN FUNGSIONAL	0	3	17	3		9	32	
2	NON JABATAN FUNGSIONAL	0	8	11	2			21	
TOTAL		0	11	28	5	0	9	53	

II. REKAPITULASI PENGAJUAN MUTASI EKSTERNAL PERIODE 2016-JUNI 2018

NO	JENIS MUTASI EKSTERNAL	USULAN MASUK	VERIFIKASI BERKAS	SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN BERKAS	REVIEW PSIKOTES/ASESMEN INTERNAL	SURAT PENAWARAN KE UNIT KERJA TUJUAN	SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PINDAH DARI PPK INSTANSI ASAL	NOTA BKN	SK	SURAT PENOLAKAN	TOTAL
1	MUTASI EKSTERNAL KE DALAM	0	10	18	3	1	10	1	15	12	70
TOTAL		0	10	18	3	1	10	1	15	12	70